

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Djumhana, Muhammad. 1994. *Hukum Ekonomi dan Sosial Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung;

Gunawan Widjaja, Ahmad Yani. 2001. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta;

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta;

Komisi Komunikasi dan Edukasi. 2014. *Badan Perlindungan Konsumen Nasional Laporan Kinerja*. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Jakarta;

Latief, Eddie. 2012. *Focused Group Discussion Implementasi Permenhub No.PM 77 tahun 2011 jo. Permenhub No. PM 92 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara*. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN). Jakarta;

Muhammad, Abdulkadir. 2007. *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi*. Genta Press. Yogyakarta;

Miru, Ahmadi. 2001. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta;

Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta;

Ningrum, Lestari. 2004. *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif HukumBisnis*.Citra Aditya Bakti. Bandung;

Nasution, Az.1995. *Konsumen dan Hukum : Tinjauan sosial ekonomi dan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta;

R. Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti. Bandung;

Sidabalok, Janus. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung;

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenada Media Group. Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan;

Undang-Undang No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan;

Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan

Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;

Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;

Peraturan Presiden No. 40 tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;

Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara;

Peraturan Menteri Perhubungan No. 92 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara;

Peraturan Menteri Perhubungan No. 185 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

### **Skripsi/Penulisan Hukum**

Nia Aisya Hammardi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2009, *Perlindungan Hukum bagi Penumpang Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional pada PT Garuda Indonesia;*

Mohammad Ali Pontas, 2015, *Efektivitas Peraturan Menteri Perhubungan No. 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara berdasarkan Perspektif Penumpang;*

Conny Tri Restyoko, 2006, *Tanggung Jawab Pengangkutan Penumpang pada Pengangkutan Udara Domestik : Studi Kasus di Perusahaan Penerbangan PT Lion Air Surabaya.*

### **Internet**

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), “Tentang BPKN”, <http://bpkn.go.id/uploads/document/af42620f40b24092a8eb7da91cd6963717375c20.pdf>

Ema Sukarelawanto, “Perlindungan Konsumen : Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) target rampungkan 11 (sebelas) rekomendasi”, <http://bpkn.go.id/uploads/document/08947996d7f0e74f96393e14fbe1f0e1a91a3b64.pdf>;

Suaraindonesia, “Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) kalah populer dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)”, <http://suaraindonesia.com/komisi-vi-dpr-bpkn-kalah-populer-dengan-ylki/>;

Adhi S Lukman, “Urgensi Badan Perlindungan Konsumen”, <http://bpkn.go.id/uploads/document/ac18df71bc5428ae7008235dff2f0abcc2430e1b.pdf>.